

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

Oleh:

Fidia Amelliyah¹

Moh Maulana Firmansyah²

Mashudi³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

*Korespondensi Penulis: 230721100050@student.trunojoyo.ac.id,
230721100131@student.trunojoyo.ac.id, mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id*

Abstract. Cooperatives have a strategic role in economic development, especially in developing countries such as Indonesia, where cooperatives serve as an important partner for the state in realizing people's welfare. Since the colonial period until post-independence, the Indonesian government has emphasized the importance of cooperatives through various provisions issued to accelerate their introduction and provide the necessary direction and support for their development. The existence of cooperatives during the colonial period was closely related to the socialist movement that sought to fight the capitalist system that was detrimental to workers. In addition, cooperatives also became a tool to improve social and economic welfare through a fairer and more equitable economic system. This article aims to present the history of cooperatives as an institution that developed in the social and economic context in Indonesia, and describe the dynamics and role of cooperatives in supporting economic development and community welfare in various historical periods. It will also explore the challenges faced by cooperatives in the context of Indonesia's social and economic changes.

Keywords: Cooperatives, Indonesia, Developing Country, Cooperative History, Cooperative Provisions, Socialist Movement.

Abstrak. Koperasi memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana koperasi berfungsi sebagai mitra penting bagi negara

Received May 23, 2025; Revised June 01, 2025; June 08, 2025

**Corresponding author: 230721100050@student.trunojoyo.ac.id*

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejak masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya koperasi melalui berbagai ketentuan yang diterbitkan untuk mempercepat pengenalamannya serta memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan bagi pengembangannya. Keberadaan koperasi pada masa kolonial erat kaitannya dengan gerakan sosialis yang berusaha melawan sistem kapitalis yang banyak merugikan buruh. Selain itu, koperasi juga menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan sejarah koperasi sebagai institusi yang berkembang dalam konteks sosial dan ekonomi di Indonesia, serta menggambarkan dinamika dan peran koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai periode sejarah. Penelitian ini juga akan menggali tantangan yang dihadapi koperasi dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Koperasi, Indonesia, Negara Yang Berkembang, Sejarah Koperasi, Ketentuan Koperasi, Gerakan Sosialis.

LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai suatu sistem yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memberdayakan ekonomi rakyat kecil. Sejak masa kolonial, konsep koperasi telah hadir di Indonesia, meskipun awal kemunculannya dibatasi dan dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, dari masa ke masa, koperasi terus mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun peranannya dalam sistem perekonomian nasional.

Memahami perjalanan panjang dan dinamika evolusi koperasi di Indonesia sangat penting untuk meninjau peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi rakyat. Sejak masa kolonial, koperasi telah hadir sebagai wadah ekonomi masyarakat, meskipun awalnya dibatasi oleh kebijakan pemerintah kolonial. Seiring waktu, koperasi mengalami transformasi signifikan yang dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

Penelusuran terhadap sejarah koperasi memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana lembaga ini tumbuh dan berkembang dalam berbagai fase kehidupan bangsa. Selain itu, pemahaman sejarah koperasi menjadi landasan penting

dalam menyusun kebijakan serta strategi yang relevan untuk memperkuat eksistensi koperasi di tengah tantangan global dan era modern saat ini.

Di era modern yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, koperasi dihadapkan pada tantangan baru sekaligus peluang untuk tumbuh lebih inklusif dan profesional. Oleh karena itu, kajian historis mengenai koperasi sangat relevan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai koperasi tradisional dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika zaman. Dengan menelaah perkembangan koperasi dari masa kolonial hingga saat ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi koperasi sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan dan Manfaat

Jurnal ini menganalisis peran koperasi dalam perekonomian nasional dari waktu ke waktu serta menguraikan kebijakan pemerintah yang telah diterapkan dan pengaruhnya terhadap perkembangan koperasi. Penelitian ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi koperasi dalam perjalannya serta mengeksplorasi kontribusi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi berbasis gotong royong. Dengan demikian, kami harap jurnal ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat luas mengenai pentingnya koperasi dalam perekonomian Indonesia.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan koperasi?
2. Bagaimanakah sejarah koperasi di dunia dan di Indonesia?
3. Bagaimanakah sejarah UMKM dan permasalahan yang muncul dalam koperasi?

KAJIAN TEORITIS

Teori Kapitalisme Terkait Perkembangan Koperasi

Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada kepemilikan pribadi dan persaingan pasar, telah menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Revolusi

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

Industri mempercepat proses ini dengan meningkatkan eksploitasi tenaga kerja serta memperlebar jurang antara pemilik modal dan pekerja. Sebagai respons terhadap dampak negatif kapitalisme, gerakan koperasi muncul untuk memberikan alternatif ekonomi berbasis solidaritas dan kesejahteraan bersama. Model koperasi pertama kali dikembangkan oleh *Rochdale Society of Equitable Pioneers* di Inggris pada tahun 1844, yang kemudian menjadi dasar bagi sistem koperasi modern. Di Indonesia, koperasi mulai berkembang sejak era kolonial sebagai bentuk perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi oleh sistem kapitalis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Konsep Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok individu untuk kepentingan bersama. Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA), koperasi didefinisikan sebagai "asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan kendalikan secara demokratis". Prinsip-prinsip dasar koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerja sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas.

Sejarah Koperasi di Indonesia

Perkembangan koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai periode, mulai dari masa kolonial hingga era modern¹.

Masa Kolonial Belanda, pada awal abad ke-20, inisiatif pendirian koperasi di Indonesia mulai muncul sebagai respons terhadap dominasi ekonomi kolonial. Tokoh seperti Raden Aria Wiriatmaja mendirikan lembaga keuangan berbasis koperasi untuk membantu masyarakat yang terjerat utang oleh rentenir. Namun, perkembangan koperasi saat itu terhambat oleh kebijakan pemerintah kolonial yang kurang mendukung gerakan ekonomi rakyat.

¹ Tulus T. H. Tambunan, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Usakti, 2016), hal. 78.

Masa Pendudukan Jepang, selama pendudukan Jepang (1942-1945), koperasi digunakan sebagai alat untuk mengendalikan distribusi bahan pokok. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya koperasi mulai tumbuh, meskipun koperasi pada masa ini lebih menguntungkan kepentingan Jepang daripada rakyat Indonesia.

Masa Kemerdekaan dan Orde Lama, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, koperasi mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai pilar utama ekonomi nasional. Presiden Soekarno menekankan pentingnya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Pada tahun 1947, Kongres Koperasi pertama diadakan di Tasikmalaya, menghasilkan berbagai keputusan penting untuk pengembangan koperasi di Indonesia.

Era Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan koperasi. Namun, banyak koperasi yang bergantung pada bantuan pemerintah, sehingga kurang mandiri dan sering terkait dengan kepentingan politik serta birokrasi.

Era Reformasi dan Modern, pasca reformasi, koperasi diarahkan menuju kemandirian dan profesionalisme. Perubahan regulasi menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Di era modern, koperasi mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti munculnya koperasi digital dan koperasi syariah yang semakin berkembang.

Teori dan Prinsip Perkembangan Koperasi

Teori ekonomi kelembagaan menyatakan bahwa koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang mampu memperbaiki ketidakseimbangan pasar dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sementara itu, teori sosial-ekonomi menekankan bahwa koperasi adalah bentuk ekonomi berbasis kebersamaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan di Indonesia mengacu pada prinsip koperasi internasional yang ditetapkan oleh ICA, termasuk partisipasi anggota, pengelolaan demokratis, dan pengembangan pendidikan koperasi².

² Rachmadi Usman, Koperasi: Prinsip dan Praktik (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010) hal 103.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

Tantangan dan Prospek Koperasi di Indonesia

Meskipun memiliki potensi besar, koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, manajemen yang lemah, serta keterbatasan modal dan akses pasar. Namun, dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, koperasi memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat. Inovasi dalam pengelolaan, peningkatan literasi keuangan, serta dukungan regulasi yang fleksibel dapat mendorong koperasi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, terutama jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, yang membahas tentang perkembangan koperasi, teori ekonomi, serta kebijakan pemerintah terkait koperasi di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai artikel, buku, dan laporan yang telah dipublikasikan dalam bidang ini.

Studi literatur ini bertujuan untuk memahami sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, baik pada masa kolonial hingga era modern, serta peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai literatur yang mengulas tentang koperasi, baik di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang serupa. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Sumber Literatur:

Pemilihan sumber literatur yang relevan dilakukan dengan memanfaatkan jurnal-jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang mengulas sejarah koperasi di Indonesia, serta teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi sosial dan ekonomi berbasis koperasi. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitasnya dan relevansi dengan topik penelitian.

2. Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan dari jurnal-jurnal yang memuat penelitian tentang sejarah koperasi, serta artikel yang membahas kebijakan pemerintah terkait

perkembangan koperasi di Indonesia. Selain itu, laporan-laporan dari lembaga-lembaga yang berfokus pada perkoperasian juga digunakan sebagai sumber data.

3. Analisis Isi:

Analisis dilakukan dengan cara membaca dan menelaah isi dari jurnal-jurnal yang ada, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan periode sejarah koperasi di Indonesia. Fokus utama dalam analisis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi serta tantangan yang dihadapi pada setiap periode sejarah.

4. Triangulasi Sumber:

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang ada. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.

5. Sintesis Data:

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyintesis informasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan koperasi di Indonesia dan bagaimana peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui metode studi literatur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih dalam tentang koperasi, serta menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang relevan dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal kemunculannya, koperasi sering kali diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan tidak jarang hanya dianggap sebagai pilihan terakhir dibandingkan dengan bentuk badan usaha ekonomi lainnya yang lebih dianggap konvensional dan lebih menguntungkan secara langsung. Banyak yang meragukan kemampuan koperasi untuk bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Namun, seiring berjalannya waktu, koperasi mampu membuktikan diri sebagai alternatif yang relevan dalam membantu mengembangkan perekonomian nasional, terutama dalam rangka pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perkembangan koperasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain, baik yang sedang berkembang maupun negara maju. Bahkan, banyak negara

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

maju berlomba-lomba mengembangkan koperasi di wilayah mereka sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian mereka dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi yang seimbang³. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, telah lama mengenal koperasi dalam berbagai bentuk, seperti koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi simpan pinjam. Bahkan, pakar-pakar ekonomi menyatakan bahwa "Inggris adalah tanah air dari koperasi konsumsi, Prancis adalah tanah air koperasi produksi, dan Jerman adalah tanah air koperasi simpan pinjam." Hal ini menunjukkan bahwa sejarah koperasi di dunia sangat beragam dan telah berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masing-masing negara.

Sejarah koperasi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode penting yang mencerminkan dinamika dan perjuangan koperasi untuk tumbuh dan berkembang di tengah tantangan yang ada, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan⁴.

Koperasi pada Zaman Kolonial Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan koperasi di Indonesia diawali oleh keinginan seorang tokoh nasional, Raden Aria Wiriaatmaja, yang saat itu menjabat sebagai Patih Purwokerto. Pada tahun 1896, beliau mendirikan sebuah lembaga yang disebut "Hulp Spaarbank" yang berarti "bank simpanan". Pendiriannya mendapat dukungan dari seorang pejabat tinggi Belanda bernama E. Sieburgh. Namun, pada awalnya, bank tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan priyayi atau pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi mereka dari praktik rentenir (lintah darat) yang sering meresahkan masyarakat. Praktik rentenir yang merugikan ini sangat umum terjadi pada masa itu dan seringkali mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Seiring berjalannya waktu, sistem yang diterapkan dalam bank ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Melihat keberhasilan ini, tujuan pendirian bank tersebut diperluas agar dapat menjangkau masyarakat pribumi yang sebelumnya kurang mendapatkan perlindungan dalam bidang ekonomi. Hal ini menandai awal dari

³ Suroto, Koperasi: Teori dan Praktik (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2004) hal 112-118

⁴ Mohammad Hatta, Sejarah Koperasi Indonesia (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1954) hal 45-50.

penggunaan sistem koperasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang ada.

Pada masa berikutnya, peran pejabat tinggi Belanda, De Wolff van Westerrode, yang menggantikan posisi E. Sieburgh, turut memberikan pengaruh terhadap pengembangan koperasi di Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, prinsip koperasi semakin diperkenalkan dan diterapkan di berbagai lapisan masyarakat.

Namun demikian, meskipun ada upaya-upaya tersebut, perkembangan koperasi di Indonesia pada masa kolonial Belanda masih terbatas. Banyak koperasi yang dibentuk tidak bertahan lama akibat kurangnya partisipasi masyarakat dan juga karena tidak adanya dukungan yang cukup dari pihak terkait.

Pada tahun 1908, sebuah organisasi kebangsaan yang sangat berpengaruh pada masanya, yaitu Budi Utomo, mendirikan koperasi rumah tangga sebagai upaya untuk membantu perekonomian rakyat. Namun, koperasi ini tidak dapat bertahan lama karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi serta kurangnya dukungan yang maksimal dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Langkah serupa juga dilakukan oleh organisasi Serikat Islam yang mendirikan Toko Koperasi, namun koperasi ini pun mengalami nasib yang sama.

Menyikapi kegagalan koperasi yang ada, pada tahun 1920 dibentuklah sebuah lembaga bernama "Cooperative Commissie" atau Komisi Koperasi yang dipimpin oleh Prof. Dr. J. H. Boeke⁵. Komisi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan konsep koperasi secara lebih luas di Indonesia. Lima tahun setelah pembentukannya, jumlah koperasi yang ada mulai meningkat secara signifikan, menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam pengelolaan koperasi di Indonesia.

Koperasi pada Masa Penjajahan Jepang

Perkembangan koperasi pada masa penjajahan Jepang mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. Pada masa ini, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap koperasi, di mana pendirian

⁵ Irsyad Muchtar, Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia (Jakarta: PT. Berkah Dua Visi, 2024), hal. 120.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

koperasi harus mendapatkan izin dan legalitas dari pemerintah Jepang yang diwakili oleh pejabat dengan pangkat minimal suchokusn atau residen. Kebijakan ini jelas menghambat perkembangan koperasi yang ada, mengingat pada masa itu, banyak koperasi yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi rakyat kecil.

Selain itu, pada masa penjajahan Jepang, seluruh aturan yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah Belanda tentang koperasi dihapuskan dan digantikan dengan kebijakan baru yang lebih menguntungkan bagi kepentingan Jepang. Sebagai alternatif, Jepang mendirikan "Kumiai", yang merupakan koperasi ala Jepang. Awalnya, Kumiai diterima dengan baik oleh masyarakat, bahkan hingga ke tingkat desa karena dianggap sebagai alat untuk menyalurkan kebutuhan rakyat. Namun, kenyataannya, Kumiai justru berfungsi sebaliknya, yakni untuk menyedot potensi ekonomi rakyat dan semakin memperburuk keadaan mereka. Dengan demikian, minat masyarakat terhadap koperasi menurun pesat, dan periode ini dikenal sebagai masa sulit bagi perkembangan koperasi di Indonesia.

Pada masa Jepang juga muncul beberapa istilah penting yang menjadi bagian dari struktur koperasi ala Jepang, antara lain:

- Shomin Kumiai Chou Jimusho: Kantor pusat jawatan koperasi.
- Shomin Kumiai Syodansyo: Kantor daerah jawatan koperasi.
- Jumin Keizikyoku: Kantor perekonomian rakyat.

Semua kantor dan lembaga tersebut tidak berfungsi untuk memperkuat koperasi, melainkan lebih kepada alat untuk mengendalikan ekonomi rakyat oleh pemerintah Jepang. Oleh karena itu, meskipun koperasi di masa ini ada, namun fungsinya sangat terbatas dan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penjajahan.

Perkembangan Koperasi Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, berbagai aspek kehidupan, termasuk koperasi, mengalami perubahan yang signifikan. Kemerdekaan politik ini membawa dampak positif terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945, peran koperasi mulai diutamakan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Keinginan untuk berkoperasi yang sempat hancur akibat politik pecah belah (divide et impera) pada masa kolonial Belanda dan sistem Kumiai pada masa penjajahan Jepang, perlahan mulai bangkit kembali. Kebangkitan ini didorong oleh semangat rakyat

dan pemerintah yang bersatu untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial di seluruh sektor kehidupan. Salah satu bentuk dukungan nyata terhadap koperasi adalah dituangkannya peranan koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Dengan semangat kebangkitan koperasi, pada Desember 1946, pemerintah Republik Indonesia melakukan reorganisasi terhadap jawatan koperasi dan perdagangan. Jawatan koperasi bertugas untuk membina dan mengembangkan gerakan koperasi di Indonesia, sementara jawatan perdagangan menangani berbagai persoalan dalam bidang perdagangan. Reorganisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama dalam perekonomian negara.

Kongres koperasi pertama di Indonesia dilaksanakan pada 11-14 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, di antaranya adalah⁶:

- Terwujudnya kesepakatan untuk mendirikan SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia).
- Ditetapkannya asas koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong.
- Ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.
- Diperluasnya pengertian dan pendidikan tentang perkoperasian ke seluruh lapisan masyarakat.

Kongres koperasi pertama ini menjadi tonggak penting dalam sejarah koperasi di Indonesia, di mana koperasi mulai dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih adil dan merata di Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, koperasi diharapkan menjadi instrumen yang mampu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia dengan cara yang berbasis pada keadilan sosial dan ekonomi.

Perkembangan Koperasi Pasca Reformasi

Pasca reformasi 1998, koperasi di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan transformasi sistem pemerintahan dan ekonomi nasional. Perubahan tersebut diawali dengan pergeseran paradigma pengembangan koperasi dari pendekatan

⁶ Abdul Atsar, *Perkembangan Hukum Koperasi di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hal. 90.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

kuantitatif, yang menekankan pada jumlah koperasi, menuju pendekatan kualitatif yang lebih fokus pada peningkatan kualitas kelembagaan, profesionalisme manajemen, serta penguatan sumber daya manusia koperasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program Reformasi Total Koperasi yang mencakup tiga strategi utama: reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Reorientasi bertujuan mengubah cara pandang terhadap koperasi agar tidak hanya sekadar alat pelengkap ekonomi rakyat, tetapi sebagai entitas usaha yang modern dan kompetitif. Rehabilitasi dilakukan melalui pembaruan data koperasi secara digital menggunakan sistem Online Database System (ODS), sedangkan pengembangan diarahkan pada peningkatan kapasitas koperasi agar mampu bersaing di pasar terbuka.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, koperasi juga mulai melakukan digitalisasi layanan dan sistem manajemen. Banyak koperasi yang bertransformasi menjadi koperasi digital, memanfaatkan platform daring untuk memberikan layanan keuangan, manajemen anggota, dan pengelolaan usaha secara lebih efisien dan transparan. Namun, terlepas dari kemajuan ini, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan skala usaha, serta citra koperasi yang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Tantangan ini perlu diatasi melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kolaborasi antar koperasi, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Meski demikian, koperasi tetap memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Koperasi terbukti mampu membuka lapangan kerja, memberikan akses pembiayaan bagi kelompok yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional, serta meningkatkan kesejahteraan anggota melalui distribusi manfaat yang adil. Dengan terus memperkuat kelembagaan dan memperluas adaptasi terhadap perkembangan zaman, koperasi berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perjalanan koperasi di Indonesia mencerminkan dinamika panjang dan penuh tantangan sejak masa kolonial hingga era modern. Awalnya, koperasi lahir dari kebutuhan

untuk melindungi rakyat dari praktik ekonomi yang menindas, seperti rentenir, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Namun, pada masa kolonial Belanda dan Jepang, perkembangan koperasi mengalami berbagai hambatan, baik karena kurangnya dukungan maupun karena manipulasi sistem oleh penguasa kolonial untuk kepentingan mereka sendiri. Meski demikian, benih koperasi telah tertanam dalam masyarakat Indonesia sebagai bentuk solidaritas ekonomi dan semangat gotong royong.

Setelah kemerdekaan, koperasi mendapatkan angin segar melalui dukungan konstitusional dan semangat nasionalisme ekonomi. Pemerintah menyadari pentingnya koperasi sebagai alat untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kongres Koperasi pertama pada tahun 1947 menjadi titik tolak penting dalam penguatan peran koperasi secara nasional. Dalam periode ini, koperasi diposisikan bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang menanamkan nilai-nilai kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan kemandirian rakyat.

Memasuki era reformasi, koperasi Indonesia mengalami transformasi struktural yang cukup signifikan. Pemerintah tidak lagi hanya menekankan pada kuantitas koperasi, tetapi mulai menitikberatkan pada kualitas tata kelola, profesionalisme pengurus, dan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi. Dengan dukungan teknologi dan digitalisasi, banyak koperasi mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan platform daring untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada anggotanya. Namun, koperasi juga dihadapkan pada tantangan besar seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, serta citra publik yang masih perlu diperbaiki.

Secara keseluruhan, koperasi tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam memberdayakan kelompok ekonomi lemah dan menciptakan keadilan sosial. Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan semangat pembaruan dan adaptasi terhadap perubahan global, koperasi Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Saran

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

1. Untuk memastikan koperasi dapat berkembang secara maksimal, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk lebih mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dan manfaat koperasi. Sebagai saran, pendidikan perkoperasian sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya memahami koperasi, perlu terus dilakukan.
2. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap sumber daya finansial yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyediakan dana bantuan atau subsidi bagi koperasi yang memenuhi syarat tertentu. Selain itu, regulasi yang jelas dan prosedur hukum yang lebih mudah dalam mendirikan koperasi akan meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.
3. Koperasi di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi dan manajemen. Penggunaan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan dan pengelolaan koperasi, seperti aplikasi mobile untuk anggota koperasi, serta sistem keuangan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Oleh karena itu, koperasi perlu didorong untuk melakukan transformasi digital guna mengoptimalkan operasional dan memperluas jangkauan pasar.
4. Agar koperasi dapat berkembang dengan lebih baik, penting bagi koperasi-koperasi yang ada untuk menjalin kerjasama yang erat antara satu dengan yang lainnya. Pembentukan federasi atau asosiasi koperasi akan memperkuat daya tawar koperasi di pasar, meningkatkan akses terhadap pasar yang lebih luas, serta memperkuat posisi koperasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Kerjasama ini dapat mencakup bidang pemasaran, pembelian bahan baku, hingga pengembangan produk bersama.
5. Untuk memastikan keberlanjutan koperasi, pengawasan yang transparan dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting dilakukan. Pemerintah dan lembaga terkait harus secara rutin melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja koperasi, baik dari segi manajerial, keuangan, maupun dampaknya terhadap anggota.

Evaluasi ini akan membantu memperbaiki sistem yang kurang efektif dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

6. Koperasi sebaiknya didorong untuk lebih fokus pada sektor-sektor yang berpotensi untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar, seperti sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah (UKM). Sebagai contoh, koperasi di sektor pertanian dapat membantu petani dalam memperoleh harga yang lebih baik untuk produk mereka dan mengakses teknologi pertanian yang lebih modern. Koperasi yang bergerak di sektor ini juga bisa berperan dalam memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan daya saing.
7. Agar koperasi benar-benar menjadi "soko guru" perekonomian Indonesia, koperasi harus lebih banyak berkembang di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga terkait, perlu menyediakan insentif untuk mendorong pendirian koperasi di daerah terpencil atau daerah dengan akses ekonomi yang terbatas. Koperasi yang tumbuh di wilayah-wilayah ini dapat membantu masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi, serta menjadi penggerak utama dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
8. Kepemimpinan yang baik dan kompeten di dalam koperasi sangat menentukan keberhasilan suatu koperasi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan bagi pengurus koperasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Program pelatihan manajerial, kepemimpinan, serta keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran akan memperkuat kapasitas pengurus koperasi dalam menjalankan organisasi dengan lebih efektif dan efisien..

DAFTAR REFERENSI

- Atsar, Abdul. Perkembangan Hukum Koperasi di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Hatta Mohammad. Sejarah Koperasi Indonesia. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1954.
- Muchtar, Irsyad. Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia. Jakarta: PT. Berkah Dua Visi, 2024.
- Sugiarto, R. Toto. Ensiklopedi Koperasi. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN

Suroto. Koperasi: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2004.

Tambunan, Tulus T. H. Koperasi Indonesia. Jakarta: Usakti, 2016.

Usman Rachmadi. Koperasi: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010